

Dana desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Sudah Tersalur 100 Persen



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/gubernur-kalsel-sahbirin-di-rapat-kerja-percepatan-penyaluran-penggunaan-dana-desa.jpg>

Pembayaran gaji untuk aparat desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sempat mengalami penundaan di awal tahun dikarenakan alokasi Dana Desa belum dilakukan pencairan. Namun, hal itu sudah teratasi seluruhnya hingga pencairan Dana Desa untuk tahap satu sudah mencapai 100 persen.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (Plt Kadin PMD) Kabupaten HSU, Amita Susana, mengatakan saat ini sudah selesai melakukan penyaluran Dana Desa hingga 100 persen. “Bahkan sekarang sudah ada beberapa desa yang melengkapi persyaratan untuk pencairan tahap dua,” ujarnya. Beberapa alokasi Dana desa adalah untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketahanan pangan dan penanganan Covid-19.

Di tempat terpisah, Ibnu Attaillah selaku Kepala Desa Pulantani mengatakan bahwa di awal tahun memang perlu waktu untuk melengkapi berkas persyaratan untuk pencairan sehingga gaji aparat desa juga sempat tertunda sampai dengan bulan Maret tadi. Namun, untuk saat ini sudah dibayarkan. Adapun jumlah dana yang diperoleh oleh desa Pulantani sekitar Rp 1,2 miliar untuk tahun 2022.

“Syarat yang memerlukan waktu untuk penyelesaiannya adalah pendataan penerima BLT. Sedangkan syarat lain, seperti RPJMDes dan lainnya bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Sekarang sudah cair dan sudah dibayarkan beberapa keperluan yang tertunda, termasuk gaji aparat desa,” ungkap Ibnu.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Pemerintah Desa Pesayangan Barat telah menyalurkan BLT Dana Desa. Penyalur bantuan itu berlangsung di kantor Kepala Desa (Pembakal) Pesayangan Barat. Kendati kantor Pembakal masih dilanda banjir yang menggenangi lantai ruangan, Perangkat Pemerintahan desa setempat tuntas menyalurkan BLT.

Sekretaris Desa Pesayangan Barat, Muhammad Mukhtar, mengatakan bahwa penyaluran BLT Dana Desa tersebut diperuntukkan bagi 84 penerima manfaat. Setiap penerima manfaat BLT mendapat Rp 900 ribu, pencairan sekaligus untuk tiga bulan. Selain itu, kriteria penerima

manfaat BLT Dana Desa tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Kategori yang termasuk penerima manfaat adalah warga yang kehilangan pekerjaan, di PHK, janda, miskin dan tidak pernah menerima bantuan sosial. “Sudah kami seleksi para penerima manfaat BLT Dana Desa,” katanya. Meskipun begitu, Pemerintah Desa Pesayangan Barat belum memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir.

Menurut Mukhtar, perencanaan bantuan bagi korban banjir sudah dibuatkan namun belum disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar ke kas Pemerintah Desa. “Tolong warga berdoa dan bersabar.”

Sementara itu, Sari dan Imas, ibu rumah tangga yang terdampak banjir di desa Pesayangan Barat mengaku tak mengungsi. Mereka mengatakan belum menerima bantuan sembako dan pengecekan kesehatan petugas medis meskipun banjir yang melanda Desa Pesayangan Barat sudah berlangsung selama 10 hari. Sari dan Imas mengungkapkan bahwa cukup mengalami kesulitan untuk berbelanja ke pasar dikarenakan genangan air. Selain itu, tidak ada penjual sayuran keliling yang lewat dan dapur memasak di rumah mereka pun sudah ikut terendam.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/06/dana-desa-di-kabupaten-hulu-sungai-utara-sudah-tersalur-100-persen>, Dana Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Sudah Tersalur 100 Persen, (06/04/22)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/24/pemerintah-desa-pesayangan-barat-kabupaten-banjar-salurkan-blt-dana-desa>, Pemerintah Desa Pesayangan Barat Kabupaten Banjar Salurkan BLT Dana Desa, (24/03/22)

Catatan :

Pengaturan mengenai Dana Desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020²

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
2. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
3. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya pada Pasal 7 memuat Pendanaan Padat Karya Tunai desa melalui Dana Desa, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa.

Pada Bab III dari pasal 7 dijelaskan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa 2022.

Pada Bab IV dijelaskan tentang kewajiban Publikasi Dan Pelaporan. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal Pemerintah desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.